BAB II
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

2.1. Aktivitas Kerja Selama Praktek Kerja Lapangan

Selama menjalani praktek kerja lapangan aktivitas kerja selama praktek kerja di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jalan Soekarno Hatta 586 bandung bagian kepegawaian aktivitas kerja selama praktek kerja di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) jalan Soekarno Hatta 586 Bandung bagian kepegawaian, penulis melakukan bagaimana melihat komunikasi internal hubungan atau komunikasi didalam perusahaan, hubungan persatuan pengelola, komunikasi *downward* (komunikasi dari atasan kepada bawahan), komunikasi *upward* (komunikasi dari bawahan kepada atasan), komunikasi horizontal (komunikasi dari orang orang yang sam tingkatnya dalam organisasi), keterampilan berkomunikasi dan berbicara, mendengarkan, menulis dan evaluasi program.

Dalam melakukan pekerjaan di tuntut untuk disiplin dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang peraturan tersebut telah di buat oleh undang-undang setiap pembuatan undang undang di tulis dalam undang undang dan sudah tentu apabila ada kesalahan akan fatal akibatnya, dalam memutuskan suatu pekerjaan di BPN di lihat dulu permasalahan lalu dikaitkan dengan undang-undang yang telah ada untuk kemudian diputuskan jalan keluarnya.

Berikut serangkaian kegiatan yang penulis lakukan selama praktek kerja lapangan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta 586.

Tabel 2.1

Kegiatan Kerja Selama PKL di Badan Pertanahan Nasional (BPN)

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Ket
1.	Senin 5 Juli 2010	1. Perkenalan, 2. Pengarahan tugas PKL oleh pembimbing PKL	Insidentil
2.	Selasa 6 Juli 2010	1. Izin mengikuti pembimbingan PKL ke kampus (diizinkan oleh pembimbing PKL)	Insidentil
3.	Rabu 7 Juli 2010	1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai, 2. Membuat Surat Hak Milik 3. Mengetik Permohonan Surat - Surat Masuk	Rutinitas
		4. Mendata Agenda Fatwa Dari Tahun 1991 samapi dengan 1995 Desa Sukamantri Kecamatan Ciawi Tasik (Insidensil)	Insidentil
4.	Kamis 8 Juli 2010	1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai, 2. Membuat Surat Hak Milik 3. Mengetik Permohonan Surat - Surat Masuk 4. Mengisi Pembukuan Agenda Surat Masuk Bidang PPSKP	Rutinitas
5.		1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai,	

	Jum'at 9 Juli 2010	2. Membuat Surat Hak Milik	
		3. Mengetik Permohonan Surat - Surat Masuk	Rutinitas
		4. Mengisi Pembukuan Agenda Surat Masuk Bidang PPSKP	
		5. Mengisi Lembar Disposisi	Insidentil
		6. Menyortir Arsip - Arsip Lama	
6.	Sabtu 10 Juli 2010	Libur	-
7.	Minggu 11 Juli 2010	Libur	-
8.	Senin 12 Juli 2010	1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai,	
		2. Membuat Surat Hak Milik	
		3. Mengetik Permohonan Surat - Surat Masuk	Rutinitas
		4. Mengisi Pembukuan Agenda Surat Masuk Bidang PPSKP	
		5. Mengisi Lembar Disposisi	
		6. Menjilid Berita Acara Rekonsiliasi Untuk Bahan Acara Rapat Barang Milik Negara	Insidentil
9.	Selasa 13 Juli 2010	1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai,	
		2. Membuat Surat Hak Milik	
		3. Mengetik Permohonan Surat - Surat Masuk	Rutinitas
		4. Mengisi Pembukuan Agenda Surat Masuk Bidang PPSKP	
		5. Mengisi Lembar Disposisi	
		6. Membuat dan Menyebarkan Undangan Acara Pengajian dalam Rangka peringatan isra mi'raj	Insidentil

10.	Rabu 14 Juli 2010	1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai,	Rutinitas
		2. Membuat Surat Hak Milik	
		3. Mengetik Permohonan Surat - Surat Masuk	
		4. Mengisi Pembukuan Agenda Surat Masuk Bidang PPSKP	
		5. Mengisi Lembar Disposisi	
		6. Menyortir Arsip - Arsip Lama	Insidentil
11.	Kamis 15 Juli 2010	1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai,	Rutinitas
		2. Membuat Surat Hak Milik	
		3. Mengetik Permohonan Surat - Surat Masuk	
		4. Mengisi Pembukuan Agenda Surat Masuk Bidang PPSKP	
		5. Mengisi Lembar Disposisi	
		6. Menyortir Arsip - Arsip Lama	Insidentil
12.	Jum'at 16 Juli 2010	1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai,	Rutinitas
		2. Membuat Surat Hak Milik	
		3. Mengetik Permohonan Surat - Surat Masuk	
		4. Mengisi Pembukuan Agenda Surat Masuk Bidang PPSKP	
		5. Mengisi Lembar Disposisi	
		6. Menyortir Arsip - Arsip Lama	Insidentil
13.	Sabtu 17 Juli 2010	Libur	-
14.	Minggu 18 Juli 2010	Libur	-
15.		1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai,	

	Senin 19 Juli 2010		Rutinitas
		2. Membuat Surat Hak Milik	
		3. Mengetik Permohonan Surat - Surat Masuk	
		4. Mengisi Pembukuan Agenda Surat Masuk Bidang PPSKP	
		5. Mengisi Lembar Disposisi	
		6. Menyortir Arsip dan Surat	Insidentil
16.	Selasa 20 Juli 2010	1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai,	Rutinitas
		2. Membuat Surat Hak Milik	
		3. Mengetik Permohonan Surat - Surat Masuk	
		4. Mengisi Pembukuan Agenda Surat Masuk Bidang PPSKP	
		5. Mengisi Lembar Disposisi	
17.	Rabu 21 Juli 2010	1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai,	Rutinitas
		2. Membuat Surat Hak Milik	
		3. Mengetik Permohonan Surat - Surat Masuk	
		4. Mengisi Pembukuan Agenda Surat Masuk Bidang PPSKP	
		5. Mengisi Lembar Disposisi	
18.	Kamis 22 Juli 2010	Izin sakit	-

19.	Jum'at 23 Juli 2010	Izin sakit	-
20.	Sabtu 24 Juli 2010	Libur	-
21.	Minggu 25 Juli 2010	Libur	-
22.	Senin 26 Juli 2010	1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai, 2. Mengisi Pembukuan Agenda Surat Masuk Bidang PPSKP Dan TU 3. Mengisi buku Kendali Masuk dan Mengisi Lembar Disposisi 4. Menyortir Arsip Lama	Rutinitas
23.	Selasa 27 Juli 2010	1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai, 2. Mengisi Pembukuan Agenda Surat Masuk Bidang PPSKP Dan TU 3. Mengisi buku Kendali Masuk dan Mengisi Lembar Disposisi 4. Menyortir Arsip Lama	Rutinitas
24.	Rabu 28 Juli 2010	1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai, 2. Mengisi Pembukuan Agenda Surat Masuk Bidang PPSKP Dan TU 3. Mengisi buku Kendali Masuk dan Mengisi Lembar Disposisi 4. Menyortir Arsip Lama	Rutinitas
25.	Kamis	1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai,	

	29 Juli 2010		Rutinitas
		2. Mengisi Pembukuan Agenda Surat Masuk Bidang PPSKP Dan TU	
		3. Mengisi buku Kendali Masuk dan Mengisi Lembar Disposisi	
		4. Menyortir Arsip Lama	
26.	Jumat 30 Juli 2010	1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai,	Rutinitas
		2. Mengisi Pembukuan Agenda Surat Masuk Bidang PPSKP Dan TU	
		3. Mengisi buku Kendali Masuk dan Mengisi Lembar Disposisi	
		4. Menyortir Arsip Lama	
27.	Sabtu 31 Juli 2010	Libur	-
28.	Minggu 01 Agustus 2010	Libur	-
29.	Senin 02 Agustus 2010	1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai,	Rutinitas
		2. Mengisi Pembukuan Agenda Surat Masuk Bidang PPSKP Dan TU	
		3. Mengisi buku Kendali Masuk dan Mengisi Lembar Disposisi	
		4. Menyortir Arsip Lama	
30.	Selasa 03 Agustus 2010	1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai,	Rutinitas
		2. Mengisi Pembukuan Agenda Surat Masuk Bidang PPSKP Dan TU	
		3. Mengisi buku Kendali Masuk dan Mengisi Lembar Disposisi	
		4. Menyortir Arsip Lama	
31.	Rabu 04 Agustus 2010	1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai,	

		2. Mengisi Pembukuan Agenda Surat Masuk Bidang PPSKP Dan TU	Rutinitas
		3. Mengisi buku Kendali Masuk dan Mengisi Lembar Disposisi	
		4. Menyortir Arsip Lama	
32.	Kamis 05 Agustus 2010	1. Menyortir Surat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai,	
		2. Mengisi Pembukuan Agenda Surat Masuk Bidang PPSKP Dan TU	Rutinitas
		3. Mengisi buku Kendali Masuk dan Mengisi Lembar Disposisi	
		4. Menyortir Arsip Lama	

Sumber: Arsip penulis tahun 2010

Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari ataupun setiap minggu oleh penulis. Menyortir surat, mengirimkan surat, menyortir arsip sesuai permintaan tamu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh penulis hampir setiap harinya.

2.2 Deskripsi Kegiatan Selama PKL

2.2.1 Deskripsi Kegiatan Rutin Selama PKL

Kegiatan rutin yang penulis lakukan selama melaksanakan praktek kerja lapangan adalah meninjau surat masuk dan keluar yang berhubungan erat dengan proses izin permohonan pertanahan. Biasanya surat-surat masuk ini berasal dari luar kantor-kantor pertanahan kota dan kabupaten di Jawa Barat. Selain itu ada juga surat pertanahan yang masuk dari PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), biasanya surat yang masuk dari PPAT ini terkait dengan pembelian tanah oleh seseorang atau lembaga.

Prosedur pekerjaan yang masuk dari masyarakat biasanya diawali dengan adanya surat masuk untuk meninjau status tanah atau meminta izin permohonan pertanahan yang kemudian diurut berdasarkan kode-kode tertentu yang terbagi menjadi dua yaitu kode untuk Kanwil BPN Provinsi dan kode untuk Kantor Pertanahan Daerah. Kode ini sendiri berbentuk tiga sampai empat (contoh: 100.1 atau 300.11) yang mana setiap kode tersebut melambangkan bidang-bidang tertentu, seperti misalnya kode 100.1 dimana angka 100 merupakan kode surat yang ditujukan untuk Bagian Tata Usaha, dan angka 1 menunjukan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Untuk lebih jelasnya mengenai kode-kode surat tersebut akan dijelaskan dalam tabel di halaman berikut ini:

Tabel 2.2
Daftar Kode-kode Registrasi Surat di Kanwil BPN Provinsi

Kode Utama	Kode Bagian	Keterangan
100	**Bagian Tata Usaha**	
	100.1	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	100.2	Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
	100.3	Sub Bagian Umum dan Informasi
200	**Bagian Survei, Pengukuran, dan Pemetaan**	
	200.4	Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar
	200.5	Seksi Pemetaan Tematik
	200.6	Seksi Pengukuran Bidang
	200.7	Seksi Survei Potensi Tanah
300	**Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah**	
	300.8	Seksi Penetapan Hak Tanah Perseorangan
	300.9	Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum
	300.10	Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah

	300.11	Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
400	**Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan**	
	400.12	Seksi Penatagunaan Tanah
	400.13	Seksi Penataan Kawasan Tertentu
	400.14	Seksi Landreform
	400.15	Seksi Konsolidasi Tanah
500	**Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	500.16	Seksi Pengendalian Pertanahan
	500.17	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
600	**Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik**	
	600.18	Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
	600.19	Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan

Sumber: Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat

Tabel 2.3
Daftar Kode-kode Registrasi Surat di Kantor Pertanahan Daerah

Kode Utama	Kode Bagian	Keterangan
100	**Bagian Tata Usaha**	
	100.1	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	100.2	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
200	**Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan**	
	200.3	Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan
	200.4	Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah
300	**Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah**	
	300.5	Sub Seksi Penetapan Hak Tanah Perseorangan
	300.6	Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah
	300.7	Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah
	300.8	Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
400	**Seksi Pengaturan Penataan Pertanahan**	
	400.9	Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
	400.10	Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah
500	**Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan**	
	500.11	Sub Seksi Pengendalian Pertanahan
	500.12	Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat
600	**Seksi Konflik Sengketa dan Perkara**	
	600.13	Sub Seksi Sengketa daan Konflik Pertanahan
	600.14	Sub Seksi Perkara Pertanahan

Sumber: Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat

Kesemua permohonan peninjauan tersbut kemudian diteruskan masuk ke meja kepala Sub Bagian Umum dan Informasi. Jika sudah mendapatkan izin persetujuan dari Kepala Sub Bagian Umum dan Informasi, maka permohonan tersebut kemudian dapat langsung diproses ke bagian-bagian yang terkait dengan permohonan tersebut, misalnya ke bagian pemetaan dan pengukuran tanah, bagian pengendalian pertanahan, bagian hak tanah dan pendaftaran tanah, dan bagian pengkajian dan penyelesaian konflik pertanahan.

Selama melaksanakan PKL, penulis mendapatkan kesempatan untuk memperoleh data rekapitulasi laporan bulanan dari bagian umum dan informasi. Data yang penulis dapatkan cukup update karena berlangsung dari bulan Januari 2010 sampai bulan Mei 2010 Sebagai Berikut Saya Contoh kan Beberapa Tabel Tersebut:

DAFTAR PENERIMAAN LAPORAN BULANAN
DARI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
SE-JAWA BARAT

NO	KABUPATEN / KOTA	KEPALA KANTOR	JENIS LAPORAN							PENERIMAAN	EVALUASI
			UMUM	UP	PPS&KP	P3	P3M	HT&PT	SP&P		
1	Kabupaten Bekasi	Drs.PURWO SASMITO,Msi	X	X	X	X	-	X	-	10-02-2010	(+)
2	Kota Bekasi	ROBINSON SIMANGUNSONG,SH	-	X	X	X	-	-	-	05-02-2010	(+)
3	Kabupaten Karawang	TUMPAL H.HUTAPEA,SH	X	X	X	X	X	X	X	05-02-2010	(+)
4	Kabupaten Purwakarta	Drs.ALMAINI,SH	X	X	X	X	-	X	X	04-02-2010	(+)
5	Kabupaten Subang	HENNIE NURAENI ASIKIN,SH,SP1	X	X	-	X	X	X	X	08-02-2010	(+)
6	Kabupaten Bogor	DJAMALUDDIN,SH,M.Hum	X	X	X	X	X	X	X	04-02-2010	(+)
7	Kota Bogor	H.ANDI MUHAMMAD RUM,SH	X	X	-	-	X	-	X	10-02-2010	(+)
8	Kota Depok	Drs.SYAFRIMAN,SH,M.Hum	X	X	-	X	-	X	X	05-02-2010	(+)
9	Kabupaten Sukabumi	YUNIAR HIKMAT GINANJAR,SH,MH	X	X	X	X	X	X	X	05-02-2010	(+)
10	Kota Sukabumi	JAMES JF TIRAYOH,SH,Msi	X	X	X	X	X	X	X	01-02-2010	(+)
11	Kabupaten Cianjur	Drs.HERI SANTOSO	X	X	X	X	-	X	X	08-02-2010	(+)
12	Kabupaten Bandung	Ir.H.M.NAJIB TAUFIEQ,MM	X	X	X	X	X	X	X	05-02-2010	(+)
13	Kota Bandung	A..SAMAD SOEMARGA,SH,MH	X	X	X	X	X	X	X	03-02-2010	(+)
14	Kota Cimahi	Drs.H.WAWAN DARMAWAN	X	X	X	X	X	-	X	03-02-2010	(+)
15	Kabupaten Sumedang	Ir.ESTI PRAJOKO,Msi	X	X	X	X	X	X	X	05-02-2010	(+)
16	Kabupaten Garut	YOYOK HADIMULYO ANWAR,SH	X	X	X	X	X	X	X	05-02-2010	(+)
17	Kabupaten Tasikmalaya	Drs.AKUR NURASA,Msi	X	X	X	X	X	X	X	05-02-2010	(+)
18	Kabupaten Ciamis	Ir.T A U F I Q	X	X	X	X	X	X	X	05-02-2010	(+)
19	Kabupaten Cirebon	Ir.M.TONY S.HAROEN M.Sc	X	X	X	X	-	X	X	05-02-2010	(+)
20	Kota Cirebon	Drs.H.DJUANDA SYAHBUDIN	X	X	X	X	X	X	X	05-02-2010	(+)
21	Kabupaten Kuningan	Ir.IRWAN NUZIRWAN	X	X	X	X	X	-	X	08-02-2010	(+)
22	Kabupaten Majalengka	Ir.H.UJANG AMAS	X	X	X	X	X	X	X	05-02-2010	(+)
23	Kabupaten Indramayu	Ir.SUTJAHYO,MM	X	X	-	X	-	X	X	05-02-2010	(+)
24	Kota Tasikmalaya	H.A.BUDIRACHMAN,SH	X	X	X	X	X	X	X	03-02-2010	(+)
25	Kota Banjar	Dr.ASLAN NOOR,SH,SP1	-	X	X	X	-	X	X	11-02-2010	(±)
26	Kabupaten Bandung Barat	DJADJA SUDJANA,SH	X	X	X	X	X	X	X	05-02-2010	(+)

Keterangan
(+) Tepat Waktu
(±) Terlambat
(-) Belum/Tidak mengirimkan
(X) Ada

Bandung, 2010
An.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Barat
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM
NIP.19571129 198003 1 003

BIDANG PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

BULAN: Januari 2010

NO	KANTOR PERTANAHAN	Sengketa	Konflik	Perkara			Selesai	Keterangan
				Perdata	PTUN	Pidana		
1	Kabupaten Bekasi	8	0	23	0	0	0	
2	Kota Bekasi	0	0	36	0	0	0	
3	Kabupaten Karawang	0	0	17	0	0	0	
4	Kabupaten Purwakarta	8	1	11	0	0	0	
5	Kabupaten Subang	0	0	0	0	0	0	*)
6	Kabupaten Bogor	7	4	53	20	0	0	
7	Kota Bogor	0	0	0	0	0	0	*)
8	Kota Depok	0	0	0	0	0	0	*)
9	Kabupaten Sukabumi	0	0	32	0	0	0	
10	Kota Sukabumi	3	1	14	0	0	0	
11	Kabupaten Cianjur	16	2	19	0	0	0	
12	Kabupaten Bandung	2	2	22	4	3	0	
13	Kota Bandung	17	0	56	0	0	0	
14	Kota Cimahi	2	0	6	0	0	0	
15	Kabupaten Sumedang	5	0	11	0	0	0	
16	Kabupaten Garut	1	17	8	0	0	0	
17	Kabupaten Tasikmalaya	4	1	0	0	0	0	
18	Kabupaten Ciamis	2	14	12	0	0	0	
19	Kabupaten Cirebon	0	0	24	6	0	0	
20	Kota Cirebon	1	0	2	0	0	0	
21	Kabupaten Kuningan	1	0	3	0	0	0	
22	Kabupaten Majalengka	0	0	0	0	0	0	NIHIL
23	Kabupaten Indramayu	0	0	0	0	0	0	*)
24	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	NIHIL
25	Kota Banjar	0	0	3	0	0	0	
26	Kabupaten Bandung Barat	7	0	14	6	0	0	
	Jumlah							

Ket :

*) Tidak mengirimkan laporan

N Nihil=(tidak ada kegiatan)

Bandung,

An.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Jawa Barat

Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM

NIP.19571129 198003 1 003

BIDANG SURVEI PENGUKURAN DAN PEMETAAN

Bulan :Januari 2010

No	Kabupaten / Kota	REALISASI PERMOHONAN PENGUKURAN (GS / SU)							
		Sisa Bulan lalu (Buah)	Permohonan Bulan ini (Buah)	Jumlah (Buah)	Selesai (Buah)	Selesai Luas (M2)	Sisa s/d Bulan ini (Buah)	Sisa s/d Bulan ini Luas (M2)	Ket
1	Kabupaten Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	*)
2	Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	*)
3	Kabupaten Karawang	1.005	1.527	2.532	491	-	2.041	-	
4	Kabupaten Purwakarta	116	238	354	128	-	226	-	
5	Kabupaten Subang	316	144	460	101	-	359	-	
6	Kabupaten Bogor	1.371	3.733	5.104	4.043	-	1.061	-	
7	Kota Bogor	1.456	603	2.059	385	-	1.674	-	
8	Kota Depok	2.163	1.191	3.354	1.016	-	2.338	-	
9	Kabupaten Sukabumi	629	217	846	131	-	715	-	
10	Kota Sukabumi	496	93	589	176	-	413	-	
11	Kabupaten Cianjur	376	478	854	401	-	453	-	
12	Kabupaten Bandung	1.544	811	2.355	708	-	1.647	-	
13	Kota Bandung	160	1.162	1.322	1.037	-	285	-	
14	Kota Cimahi	49	118	167	61	-	106	-	
15	Kabupaten Sumedang	25	231	256	124	-	132	-	
16	Kabupaten Garut	345	499	844	237	-	607	-	
17	Kabupaten Tasikmalaya	302	109	411	3	-	408	-	
18	Kabupaten Ciamis	242	105	347	129	-	218	-	
19	Kabupaten Cirebon	1.174	290	1.464	702	-	762	-	
20	Kota Cirebon	121	68	189	81	-	108	-	
21	Kabupaten Kuningan	314	145	459	193	-	266	-	
22	Kabupaten Majalengka	53	119	172	39	-	133	-	
23	Kabupaten Indramayu	186	329	515	179	-	336	-	
24	Kota Tasikmalaya	1.271	179	1.450	344	-	1.106	-	
25	Kota Banjar	134	8	142	38	-	104	-	
26	Kabupaten Bandung Barat	241	509	750	386	-	364	-	
	Jumlah	14.089	12.906	26.995	11.133	-	15.862	-	

Bandung,

Kepala Bagian Tata Usaha

Ket :

*) Tidak mengirimkan laporan

Drs.H.ARMANSYAH SALAM

NIP.19571129 198003 1 003

BAGIAN TATA USAHA

a. Rekapitulasi Jumlah Surat Masuk dan Keluar

Bulan : Januari 2010

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Surat		Keterangan
		Masuk	Keluar	
1	Kantor Wilayah BPN	448	375	
2	Kabupaten Bekasi	165	67	
3	Kota Bekasi			*)
4	Kabupaten Karawang	339	116	
5	Kabupaten Purwakarta	122	31	
6	Kabupaten Subang	137	76	
7	Kabupaten Bogor	579	322	
8	Kota Bogor	128	42	
9	Kota Depok	271	76	
10	Kabupaten Sukabumi	168	70	
11	Kota Sukabumi	84	61	
12	Kabupaten Cianjur	63	63	
13	Kabupaten Bandung	194	85	
14	Kota Bandung	263	79	
15	Kota Cimahi	109	110	
16	Kabupaten Sumedang	118	59	
17	Kabupaten Garut	62	38	
18	Kabupaten Tasikmalaya	76	83	
19	Kabupaten Ciamis	62	24	
20	Kabupaten Cirebon	180	103	
21	Kota Cirebon	135	113	
22	Kabupaten Kuningan	65	34	
23	Kabupaten Majalengka	103	77	
24	Kabupaten Indramayu	111	46	
25	Kota Tasikmalaya	95	59	
26	Kota Banjar			*)
27	Kabupaten Bandung Bara	78	64	

Keterangan

*) Tidak mengirim laporan

Bandung,

An.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Barat
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM
NIP.19571129 198003 1 003

F. Tanah : Swapraja

No.	Kabupaten / Kota	Sisa Obyek Yang Diredistribusikan		Luas Tanah Yang Sudah Diredistribusi (REDISTRIBUSI)				Luas Tanah Yang Diusulkan Diredistribusikan		Pembayaran Ganti Rugi Dari Negara Kepada Bekas Pemilik			Usul Pembayaran Ganti Rugi Dari Negara			Ket.
		Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Dibagikan Kepada (KK)	Uang Pemasukan Kpd Negara (Rp)	Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Besarnya Ganti Rugi (Rp)	Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Besarnya Ganti Rugi (Rp)	
1	Kabupaten Bekasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
2	Kota Bekasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
3	Kabupaten Karawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
4	Kabupaten Purwakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
5	Kabupaten Subang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
6	Kabupaten Bogor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*)
7	Kota Bogor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*)
8	Kota Depok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
9	Kabupaten Sukabumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
10	Kota Sukabumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
11	Kabupaten Cianjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
12	Kabupaten Bandung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
13	Kota Bandung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
14	Kota Cimahi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
15	Kabupaten Sumedang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
16	Kabupaten Garut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
17	Kabupaten Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
18	Kabupaten Ciamis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
19	Kabupaten Cirebon	14.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Kota Cirebon	3.799.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Kabupaten Kuningan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
22	Kabupaten Majalengka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
23	Kabupaten Indramayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
24	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
25	Kota Banjar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*)
26	Kabupaten Bandung Bara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
	Jumlah															

Ket :

*) Tidak mengirimkan laporan

Bandung,

Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM

NIP.19571129 198003 1 003

DAFTAR PENERIMAAN LAPORAN BULANAN
DARI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
SE-JAWA BARAT

NO	KABUPATEN / KOTA	KEPALA KANTOR	JENIS LAPORAN							PENERIMAAN	EVALUASI
			UMUM	UP	PPS& KP	P3	P3M	HT& PT	SP&P		
1	Kabupaten Bekasi	Drs.PURWO SASMITO,Msi	X	X	X	-	X	X	-	08-03-2010	(+)
2	Kota Bekasi	ROBINSON SIMANGUNSONG,SH	X	X	X	X	X	-	-	05-03-2010	(+)
3	Kabupaten Karawang	TUMPAL H.HUTAPEA,SH	X	X	X	X	X	X	X	05-03-2010	(+)
4	Kabupaten Purwakarta	Drs.ALMAINI,SH	X	X	-	X	X	X	X	04-03-2010	(+)
5	Kabupaten Subang	HENNIE NURAENI ASIKIN,SH,SP1	X	X	-	X	X	X	X	05-03-2010	(+)
6	Kabupaten Bogor	DJAMALUDDIN,SH,M.Hum	X	X	X	X	X	X	X	04-03-2010	(+)
7	Kota Bogor	H.ANDI MUHAMMAD RUM,SH	X	X	-	-	-	-	X	08-03-2010	(+)
8	Kota Depok	Drs.SYAFRIMAN,SH,M.Hum	X	X	-	X	-	X	X	05-03-2010	(+)
9	Kabupaten Sukabumi	YUNIAR HIKMAT GINANJAR,SH,MH	X	X	X	X	X	X	X	05-03-2010	(+)
10	Kota Sukabumi	JAMES JF TIRAYOH,SH,Msi	X	X	X	X	X	X	X	01-03-2010	(+)
11	Kabupaten Cianjur	Drs.HERI SANTOSO	X	X	X	X	X	X	X	08-03-2010	(+)
12	Kabupaten Bandung	Ir.H.M.NAJIB TAUFIEQ,MM	X	X	X	X	X	X	X	05-03-2010	(+)
13	Kota Bandung	A..SAMAD SOEMARGA,SH,MH	X	X	X	X	X	X	X	04-03-2010	(+)
14	Kota Cimahi	Drs.H.WAWAN DARMAWAN	X	X	X	X	X	X	X	04-03-2010	(+)
15	Kabupaten Sumedang	Ir.ESTI PRAJOKO,Msi	X	X	X	X	X	X	X	05-03-2010	(+)
16	Kabupaten Garut	YOYOK HADIMULYO ANWAR,SH	X	X	-	X	X	X	X	05-03-2010	(+)
17	Kabupaten Tasikmalaya	Drs.AKUR NURASA,Msi	X	X	X	X	X	X	X	05-03-2010	(+)
18	Kabupaten Ciamis	Ir.T A U F I Q	X	X	X	X	X	X	X	08-03-2010	(+)
19	Kabupaten Cirebon	Ir.M.TONY S.HAROEN M.Sc	X	X	X	X	X	X	X	05-03-2010	(+)
20	Kota Cirebon	Drs.H.DJUANDA SYAHBUDIN	X	X	X	X	X	X	X	04-03-2010	(+)
21	Kabupaten Kuningan	Ir.IRWAN NUZIRWAN	X	X	X	X	X	X	X	05-03-2010	(+)
22	Kabupaten Majalengka	Ir.H.UJANG AMAS	X	X	X	X	X	X	X	04-03-2010	(+)
23	Kabupaten Indramayu	Ir.SUTJAHYO,MM	X	X	-	X	X	X	X	05-03-2010	(+)
24	Kota Tasikmalaya	H.A.BUDIRACHMAN,SH	X	X	-	X	X	X	X	04-03-2010	(+)
25	Kota Banjar	Dr.ASLAN NOOR,SH,SP1	X	X	X	-	-	X	X	11-03-2010	(+)
26	Kabupaten Bandung Barat	DJADJA SUDJANA,SH	X	X	X	X	X	X	X	05-03-2010	(+)

Keterangan
(+) Tepat Waktu
(+) Terlambat
(-) Belum/Tidak mengirimkan
(X) Ada

Bandung, 2010
An.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Barat
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM
NIP.19571129 198003 1 003

e. Rekapitulasi Permohonan Hak Atas Tanah

No.	Kabupaten / Kota	Sisa Permohonan Bulan lalu		Permohonan Bulan ini		Jumlah Permohonan		Permohonan Dikirim ke Kanwil BPN		Ket.
		(Buah)	Luas (M2)	(Buah)	Luas (M2)	(Buah)	Luas (M2)	(Buah)	(M2)	
1	Kabupaten Bekasi	6	0	10	0	16	0	0	0	
2	Kota Bekasi	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Kabupaten Karawang	0	0	216	23.209	216	23.209	0	0	
4	Kabupaten Purwakarta	0	0	5	666	5	666	0	0	
5	Kabupaten Subang	23	63.025	23	83.373	46	146.398	1	11.884	
6	Kabupaten Bogor	109	1.533.981	47	647.575	156	2.181.556	18	294.034	
7	Kota Bogor	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Kota Depok	4	1.183	13	31.364	17	32.547	0	0	
9	Kabupaten Sukabumi	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kota Sukabumi	0	0	4	291	4	291	0	0	
11	Kabupaten Cianjur	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kabupaten Bandung	27	228.666	26	104.541	53	333.207	8	119.242	
13	Kota Bandung	74	121.763	85	77.127	159	198.890	31	101.954	
14	Kota Cimahi	0	0	81	4.888	81	4.888	0	0	
15	Kabupaten Sumedang	11	2.184.980	0	0	11	2.184.980	11	2.184.980	
16	Kabupaten Garut	0	0	12	23.406	12	23.406	1	14.480	
17	Kabupaten Tasikmalaya	17	574.167	0	0	17	574.167	14	567.206	
18	Kabupaten Ciamis	0	0	0	0	0	0	0	0	Nihil
19	Kabupaten Cirebon	0	0	9	12.738	9	12.738	1	4.025	
20	Kota Cirebon	24	110.958	32	14.828	56	125.786	0	0	
21	Kabupaten Kuningan	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Kabupaten Majalengka	0	0	0	0	0	0	0	0	Nihil
23	Kabupaten Indramayu	0	0	12	10.344	12	10.344	0	0	
24	Kota Tasikmalaya	0	0	30	39.349	30	39.349	5	31.655	
25	Kota Banjar	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Kabupaten Bandung Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah									

Ket :

*) Tidak mengirimkan laporan

BIDANG PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

BULAN : Pebruari 2010

NO	KANTOR PERTANAHAN	Sengketa	Konflik	Perkara			Selesai	Keterangan
				Perdata	PTUN	Pidana		
1	Kabupaten Bekasi	12	0	26	0	0	0	
2	Kota Bekasi	10	0	36	16	0	0	
3	Kabupaten Karawang	0	0	13	0	0	0	
4	Kabupaten Purwakarta	0	0	0	0	0	0	*)
5	Kabupaten Subang	0	0	0	0	0	0	*)
6	Kabupaten Bogor	3	0	57	21	0	0	
7	Kota Bogor	0	0	0	0	0	0	*)
8	Kota Depok	0	0	0	0	0	0	*)
9	Kabupaten Sukabumi	1	0	32	0	0	0	
10	Kota Sukabumi	1	1	14	0	0	0	
11	Kabupaten Cianjur	17	2	21	0	0	0	
12	Kabupaten Bandung	3	2	22	5	0	0	
13	Kota Bandung	18	0	59	0	0	0	
14	Kota Cimahi	0	0	7	0	0	0	
15	Kabupaten Sumedang	5	0	11	0	0	0	
16	Kabupaten Garut	0	0	0	0	0	0	*)
17	Kabupaten Tasikmalaya	4	1	1	0	0	0	
18	Kabupaten Ciamis	0	14	9	0	0	0	
19	Kabupaten Cirebon	3	0	17	3	0	0	
20	Kota Cirebon	0	0	3	0	0	0	
21	Kabupaten Kuningan	0	0	3	0	0	0	
22	Kabupaten Majalengka	0	0	0	0	0	0	NIHIL
23	Kabupaten Indramayu	0	0	0	0	0	0	*)
24	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	*)
25	Kota Banjar	0	0	0	0	0	0	NIHIL
26	Kabupaten Bandung Barat	0	0	14	6	0	0	
	Jumlah							

Ket :

*) Tidak mengirimkan laporan

N Nihil=(tidak ada kegiatan)

Bandung,

An.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Barat
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM
NIP.19571129 198003 1 003

BIDANG SURVEI PENGUKURAN DAN PEMETAAN

Bulan :Pebruari 2010

No	Kabupaten / Kota	REALISASI PERMOHONAN PENGUKURAN (GS / SU)							
		Sisa	Permohonan	Jumlah	Selesai		Sisa s/d Bulan ini		
		Bulan lalu	Bulan ini			Luas		Luas	Ket
		(Buah)	(Buah)	(Buah)	(Buah)	(M2)	(Buah)	(M2)	
1	Kabupaten Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	*)
2	Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	*)
3	Kabupaten Karawang	2.041	943	2.984	1.130		1.854	-	
4	Kabupaten Purwakarta	226	144	370	163		207	-	
5	Kabupaten Subang	359	184	543	146		397	-	
6	Kabupaten Bogor	1.061	3.336	4.397	2.421		1.976	-	
7	Kota Bogor	1.674	436	2.110	508		1.602	-	
8	Kota Depok	2.338	1.287	3.625	1.246		2.379	-	
9	Kabupaten Sukabumi	715	484	1.199	519		680	-	
10	Kota Sukabumi	413	62	475	164		311	-	
11	Kabupaten Cianjur	453	337	790	347		443	-	
12	Kabupaten Bandung	1.647	1.252	2.899	580		2.319	-	
13	Kota Bandung	285	872	1.157	910		247	-	
14	Kota Cimahi	117	108	225	58		167	-	
15	Kabupaten Sumedang	132	194	326	139		187	-	
16	Kabupaten Garut	607	297	904	476		428	-	
17	Kabupaten Tasikmalaya	408	78	486	141		345	-	
18	Kabupaten Ciamis	218	124	342	145		197	-	
19	Kabupaten Cirebon	762	352	1.114	451		663	-	
20	Kota Cirebon	108	81	189	82		107	-	
21	Kabupaten Kuningan		159	159				-	
22	Kabupaten Majalengka	133	126	259	92		167	-	
23	Kabupaten Indramayu	336	469	805	314		491	-	
24	Kota Tasikmalaya	1.106	104	1.210	206		1.004	-	
25	Kota Banjar	134	8	142	38		104	-	
26	Kabupaten Bandung Barat	364	530	894	459		435	-	
	Jumlah	15.637	11.967	27.604	10.735	-	16.710	-	

Bandung,

Ket :

Kepala Bagian Tata Usaha

*) Tidak mengirimkan laporan

Drs.H.ARMANSYAH SALAM

NIP.19571129 198003 1 003

BAGIAN TATA USAHA

a. Rekapitulasi Jumlah Surat Masuk dan Keluar

Bulan : Pebruari 2010

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Surat		Keterangan
		Masuk	Keluar	
1	Kantor Wilayah BPN	400	387	
2	Kabupaten Bekasi	158	63	
3	Kota Bekasi	480	25	
4	Kabupaten Karawang	349	68	
5	Kabupaten Purwakarta	119	46	
6	Kabupaten Subang	170	203	
7	Kabupaten Bogor	504	318	
8	Kota Bogor	128	42	
9	Kota Depok	271	76	
10	Kabupaten Sukabumi	211	108	
11	Kota Sukabumi	72	51	
12	Kabupaten Cianjur	99	77	
13	Kabupaten Bandung	160	88	
14	Kota Bandung	272	93	
15	Kota Cimahi	101	49	
16	Kabupaten Sumedang	107	50	
17	Kabupaten Garut	61	39	
18	Kabupaten Tasikmalaya	66	60	
19	Kabupaten Ciamis	62	38	
20	Kabupaten Cirebon	194	47	
21	Kota Cirebon	121	28	
22	Kabupaten Kuningan	70	37	
23	Kabupaten Majalengka	103	97	
24	Kabupaten Indramayu	105	55	
25	Kota Tasikmalaya	85	55	
26	Kota Banjar	69	41	
27	Kabupaten Bandung Barat	86	66	

Keterangan

*) Tidak mengirim laporan

Bandung,

An.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Jawa Barat

Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM

NIP.19571129 198003 1 003

BIDANG PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN

Bulan : Pebruari 2010

a.Rekapitulasi Permohonan dan Produksi Aspek Penatagunaan Tanah

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Permohonan dan Produksi Aspek Penatagunaan Tanah										Ket.
		Sisa Permohonan Bulan Lalu		Permohonan Bulan ini		Jumlah Permohonan		Selesai Bulan Ini		Sisa s/d Bulan Ini		
		Buah	Luas (M2)	Buah	Luas (M2)	Buah	Luas (M2)	Buah	Luas (M2)	Buah	Luas (M2)	
1	Kabupaten Bekasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*)
2	Kota Bekasi	0	0	10	10625	10	10625	10	10625	0	0	
3	Kabupaten Karawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
4	Kabupaten Purwakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
5	Kabupaten Subang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
6	Kabupaten Bogor	0	0	21	753415	21	753415	21	753415	0	0	
7	Kota Bogor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*)
8	Kota Depok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Form tdk jelas
9	Kabupaten Sukabumi	0	0	4	103364	4	103364	4	103364	0	0	
10	Kota Sukabumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
11	Kabupaten Cianjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
12	Kabupaten Bandung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Kota Bandung	0	0	5	990	0	0	5	990	0	0	
14	Kota Cimahi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
15	Kabupaten Sumedang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
16	Kabupaten Garut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
17	Kabupaten Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
18	Kabupaten Ciamis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
19	Kabupaten Cirebon	0	0	3	513	3	513	3	513	3	513	
20	Kota Cirebon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
21	Kabupaten Kuningan	0	0	2	49402	2	49402	2	49402	0	0	
22	Kabupaten Majalengka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
23	Kabupaten Indramayu	0	0	5	14519	0	0	0	0	0	0	
24	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
25	Kota Banjar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*)
26	Kabupaten Bandung Barat	0	0	3	18256	3	18256	3	18256	0	0	
	Jumlah											

Ket :

*) Tidak mengirimkan laporan

DAFTAR PENERIMAAN LAPORAN BULANAN
DARI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
SE-JAWA BARAT

NO	KABUPATEN / KOTA	KEPALA KANTOR	JENIS LAPORAN							PENERIMAAN	EVALUASI
			UMUM	UP	PPS&KP	P3	P3M	HT&PT	SP&P		
1	Kabupaten Bekasi	Drs.PURWO SASMITO,Msi	X	X	X	X	X	X	X	09-04-2010	(+)
2	Kota Bekasi	ROBINSON SIMANGUNSONG,SH	X	X	X	X	X	X	X	05-04-2010	(+)
3	Kabupaten Karawang	TUMPAL H.HUTAPEA,SH	X	X	X	X	X	X	X	06-04-2010	(+)
4	Kabupaten Purwakarta	Drs.ALMAINI,SH	X	X	X	X	X	X	X	06-04-2010	(+)
5	Kabupaten Subang	HENNIE NURAENI ASIKIN,SH,SP1	X	X	X	X	X	X	X	06-04-2010	(+)
6	Kabupaten Bogor	DJAMALUDDIN,SH,M.Hum	X	X	X	X	X	X	X	05-04-2010	(+)
7	Kota Bogor	H.ANDI MUHAMMAD RUM,SH	X	X	X	X	X	X	X	09-04-2010	(+)
8	Kota Depok	Drs.SYAFRIMAN,SH,M.Hum	X	X	X	X	X	X	X	07-04-2010	(+)
9	Kabupaten Sukabumi	YUNIAR HIKMAT GINANJAR,SH,MH	X	X	X	X	X	X	X	07-04-2010	(+)
10	Kota Sukabumi	JAMES JF TIRAYOH,SH,Msi	X	X	X	X	X	X	X	01-04-2010	(+)
11	Kabupaten Cianjur	Drs.HERI SANTOSO	X	X	X	X	X	X	X	07-04-2010	(+)
12	Kabupaten Bandung	Ir.H.M.NAJIB TAUFIEQ,MM	X	X	X	X	X	X	X	06-04-2010	(+)
13	Kota Bandung	A..SAMAD SOEMARGA,SH,MH	X	X	X	X	X	X	X	05-04-2010	(+)
14	Kota Cimahi	Drs.H.WAWAN DARMAWAN	X	X	X	X	X	X	X	12-04-2010	(+)
15	Kabupaten Sumedang	Ir.ESTI PRAJOKO,Msi	X	X	X	X	X	X	X	05-04-2010	(+)
16	Kabupaten Garut	YOYOK HADIMULYO ANWAR,SH	X	X	X	X	X	X	X	05-04-2010	(+)
17	Kabupaten Tasikmalaya	Drs.AKUR NURASA,Msi	X	X	X	X	X	X	X	05-04-2010	(+)
18	Kabupaten Ciamis	Ir.T A U F I Q	X	-	X	X	X	-	X	05-04-2010	(+)
19	Kabupaten Cirebon	Ir.M.TONY S.HAROEN M.Sc	X	X	X	X	X	X	X	07-04-2010	(+)
20	Kota Cirebon	Drs.H.DJUANDA SYAHBUDIN	X	X	X	X	X	X	X	06-04-2010	(+)
21	Kabupaten Kuningan	Ir.IRWAN NUZIRWAN	-	-	X	X	X	X	X	09-04-2010	(+)
22	Kabupaten Majalengka	Ir.H.UJANG AMAS	X	X	X	X	X	X	X	06-04-2010	(+)
23	Kabupaten Indramayu	Ir.SUTJAHYO,MM	X	X	-	X	X	X	X	09-04-2010	(+)
24	Kota Tasikmalaya	H.A.BUDIRACHMAN,SH	X	X	X	X	X	X	X	05-04-2010	(+)
25	Kota Banjar	Dr.ASLAN NOOR,SH,SP1	-	-	-	-	-	-	-		(+)
26	Kabupaten Bandung Barat	DJADJA SUDJANA,SH	X	X	X	X	X	X	X	06-04-2010	(+)

Keterangan

(+) Tepat Waktu

(+) Terlambat

(-) Belum/Tidak mengirimkan

(X) Ada

Bandung, 2010

An.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Jawa Barat

Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM

NIP.19571129 198003 1 003

e. Rekapitulasi Permohonan Hak Atas Tanah

No.	Kabupaten / Kota	Sisa Permohonan Bulan lalu		Permohonan Bulan ini		Jumlah Permohonan		Permohonan Dikirim ke Kanwil BPN		Ket.
		(Buah)	Luas (M2)	(Buah)	Luas (M2)	(Buah)	Luas (M2)	(Buah)	(M2)	
1	Kabupaten Bekasi	6	0	40	0	46	0	0	0	
2	Kota Bekasi	30	126.940	69	173.967	99	300.907	4	228.368	
3	Kabupaten Karawang	0	0	20	244.149	20	244.149	0	0	
4	Kabupaten Purwakarta	4	357	10	376.491	14	376.848	4	1.189.634	
5	Kabupaten Subang	36	121.829	7	11.294	43	133.123	2	16.404	
6	Kabupaten Bogor	138	1.677.522	78	653.717	216	2.331.239	65	507.438	
7	Kota Bogor	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Kota Depok	0	0	1	7.160	1	7.160	0	0	
9	Kabupaten Sukabumi	2	955	8	29.183	10	30.138	1	21.724	
10	Kota Sukabumi	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kabupaten Cianjur	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kabupaten Bandung	16	166.838	38	93.934	54	260.772	7	213.027	
13	Kota Bandung	128	96.766	86	368.534	214	465.300	88	166.956	
14	Kota Cimahi	0	0	12	1.536	12	1.536	0	0	
15	Kabupaten Sumedang	11	2.184.980	0	0	11	2.184.980	11	2.184.980	
16	Kabupaten Garut	0	0	4	0	4	0	2	0	
17	Kabupaten Tasikmalaya	15	571.646	0	0	15	571.646	14	567.206	
18	Kabupaten Ciamis	0	0	3	17.188	3	17.188	0	0	
19	Kabupaten Cirebon	0	0	16	8.164	16	8.164	0	0	
20	Kota Cirebon	48	220.285	10	2.242	58	222.527	0	0	
21	Kabupaten Kuningan	0	0	1	0	1	0	0	0	
22	Kabupaten Majalengka	0	0	3	2.521	3	2.521	0	0	
23	Kabupaten Indramayu	0	0	5	36.646	5	36.646	0	0	
24	Kota Tasikmalaya	0	0	29	53.228	29	53.228	4	22.874	
25	Kota Banjar	0	0	0	0	0	0	0	0	*)
26	Kabupaten Bandung Barat	8	155.919	15	27.673	23	183.592	0	0	
	Jumlah	442	5.324.037	455	2.107.627	897	7.431.664	202	5.118.611	

Ket :

*) Tidak mengirimkan laporan

BIDANG PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

BULAN : Maret 2010

NO	KANTOR PERTANAHAN	Sengketa	Konflik	Perkara			Selesai	Keterangan
				Perdata	PTUN	Pidana		
1	Kabupaten Bekasi	10	0	26	0	0	0	
2	Kota Bekasi	10	0	52	0	0	0	
3	Kabupaten Karawang	0	0	0	0	0	0	
4	Kabupaten Purwakarta	9	1	6	0	0	0	
5	Kabupaten Subang	2	0	0	0	0	0	
6	Kabupaten Bogor	6	0	83	0	0	0	
7	Kota Bogor	2	0	23	0	0	0	
8	Kota Depok	16	3	91	0	0	0	
9	Kabupaten Sukabumi	5	1	32	0	0	0	
10	Kota Sukabumi	0	1	14	0	0	0	
11	Kabupaten Cianjur	17	2	23	0	0	0	
12	Kabupaten Bandung	3	2	22	4	0	0	
13	Kota Bandung	17	0	57	0	0	0	
14	Kota Cimahi	2	0	8	0	0	0	
15	Kabupaten Sumedang	5	0	11	0	0	0	
16	Kabupaten Garut	1	16	7	0	0	0	
17	Kabupaten Tasikmalaya	4	1	1	0	0	0	
18	Kabupaten Ciamis	2	14	11	0	0	0	
19	Kabupaten Cirebon	4	0	22	6	0	0	
20	Kota Cirebon	1	0	3	0	0	0	
21	Kabupaten Kuningan	2	0	3	0	0	0	
22	Kabupaten Majalengka	3	0	0	0	0	0	
23	Kabupaten Indramayu	0	0	0	0	0	0	
24	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	NIHIL
25	Kota Banjar	0	0	0	0	0	0	
26	Kabupaten Bandung Barat	0	0	0	6	0	0	
	Jumlah							

Ket :

*) Tidak mengirimkan laporan

N Nihil=(tidak ada kegiatan)

Bandung,

An.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Barat
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM
NIP.19571129 198003 1 003

BIDANG SURVEI PENGUKURAN DAN PEMETAAN

Bulan :Maret 2010

No	Kabupaten / Kota	REALISASI PERMOHONAN PENGUKURAN (GS / SU)							
		Sisa Bulan lalu (Buah)	Permohonan Bulan ini (Buah)	Jumlah (Buah)	Selesai (Buah)	Selesai Luas (M2)	Sisa s/d Bulan ini (Buah)	Sisa s/d Bulan ini Luas (M2)	Ket
1	Kabupaten Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kota Bekasi	3.954	959	4.913	1.265	-	3.648	-	
3	Kabupaten Karawang	1.854	830	2.684	543		2.141	-	
4	Kabupaten Purwakarta	207	62	269	116		153	-	
5	Kabupaten Subang	397	93	490	176		314	-	
6	Kabupaten Bogor	1.976	3.057	5.033	3.113		1.920	-	
7	Kota Bogor	1.602	521	2.123	459		1.664	-	
8	Kota Depok	4.641	1.820	6.461	2.262		4.199	-	
9	Kabupaten Sukabumi	680	417	1.097	432		665	-	
10	Kota Sukabumi	311	54	365	254		111	-	
11	Kabupaten Cianjur	443	423	866	388		478	-	
12	Kabupaten Bandung	2.319	958	3.277	1.066		2.211	-	
13	Kota Bandung	247	1.049	1.296	1.062		234	-	
14	Kota Cimahi	167	143	310	144		166	-	
15	Kabupaten Sumedang	187	183	370	93		277	-	
16	Kabupaten Garut	428	152	580	109		471	-	
17	Kabupaten Tasikmalaya	343	250	593	259		334	-	
18	Kabupaten Ciamis	197	104	301	123		178	-	
19	Kabupaten Cirebon	663	296	959	479		480	-	
20	Kota Cirebon	107	92	199	99		100	-	
21	Kabupaten Kuningan	170	178	348	192		156	-	
22	Kabupaten Majalengka	500	275	775	4		771	-	
23	Kabupaten Indramayu	491	114	605	318		287	-	
24	Kota Tasikmalaya	1.004	526	1.530	169		1.361	-	
25	Kota Banjar	-	-	-	-		-	-	*)
26	Kabupaten Bandung Barat	435	661	1.096	519		577	-	
	Jumlah	23.323	13.217	36.540	13.644	-	22.896	-	

Bandung,

Kepala Bagian Tata Usaha

Ket :

*) Tidak mengirimkan laporan

Drs.H.ARMANSYAH SALAM

NIP.19571129 198003 1 003

BAGIAN TATA USAHA

a. Rekapitulasi Jumlah Surat Masuk dan Keluar

Bulan : Maret 2010

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Surat		Keterangan
		Masuk	Keluar	
1	Kantor Wilayah BPN	531	1261	
2	Kabupaten Bekasi	172	55	
3	Kota Bekasi	447	19	
4	Kabupaten Karawang	324	112	
5	Kabupaten Purwakarta	141	43	
6	Kabupaten Subang	173	178	
7	Kabupaten Bogor	645	372	
8	Kota Bogor	151	57	
9	Kota Depok	371	99	
10	Kabupaten Sukabumi	197	96	
11	Kota Sukabumi	120	63	
12	Kabupaten Cianjur	127	150	
13	Kabupaten Bandung	213	138	
14	Kota Bandung	333	92	
15	Kota Cimahi	121	70	
16	Kabupaten Sumedang	118	44	
17	Kabupaten Garut	97	29	
18	Kabupaten Tasikmalaya	92	91	
19	Kabupaten Ciamis	74	53	
20	Kabupaten Cirebon	199	71	
21	Kota Cirebon	154	65	
22	Kabupaten Kuningan			*)
23	Kabupaten Majalengka	122	78	
24	Kabupaten Indramayu	108	58	
25	Kota Tasikmalaya	95	85	
26	Kota Banjar			*)
27	Kabupaten Bandung Barat	94	49	

Keterangan

*) Tidak mengirim laporan

Bandung,

An.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Jawa Barat

Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM

NIP.19571129 198003 1 003

F. Tanah : Swapraja

No.	Kabupaten / Kota	Sisa Obyek Yang Diredistribusikan		Luas Tanah Yang Sudah Diredistribusi (REDISTRIBUSI)				Luas Tanah Yang Diusulkan Diredistribusikan		Pembayaran Ganti Rugi Dari Negara Kepada Bekas Pemilik			Usul Pembayaran Ganti Rugi Dari Negara			Ket.
		Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Dibagikan Kepada (KK)	Uang Pemasukan Kpd Negara (Rp)	Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Besarnya Ganti Rugi (Rp)	Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Besarnya Ganti Rugi (Rp)	
1	Kabupaten Bekasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
2	Kota Bekasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
3	Kabupaten Karawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
4	Kabupaten Purwakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*)
5	Kabupaten Subang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
6	Kabupaten Bogor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
7	Kota Bogor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
8	Kota Depok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
9	Kabupaten Sukabumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
10	Kota Sukabumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
11	Kabupaten Cianjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
12	Kabupaten Bandung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
13	Kota Bandung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
14	Kota Cimahi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
15	Kabupaten Sumedang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
16	Kabupaten Garut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
17	Kabupaten Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
18	Kabupaten Ciamis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
19	Kabupaten Cirebon	14.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Kota Cirebon	3.799.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Kabupaten Kuningan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
22	Kabupaten Majalengka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
23	Kabupaten Indramayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
24	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*)
25	Kota Banjar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Kabupaten Bandung Bara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
	Jumlah	3.814.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ket :

*) Tidak mengirimkan laporan

Bandung,

Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM

NIP.19571129 198003 1 003

DAFTAR PENERIMAAN LAPORAN BULANAN
DARI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
SE-JAWA BARAT

NO	KABUPATEN / KOTA	KEPALA KANTOR	JENIS LAPORAN							PENERIMAAN	EVALUASI
			UMUM	UP	PPS& KP	P3	P3M	HT& PT	SP&P		
1	Kabupaten Bekasi	Drs.PURWO SASMITO,Msi	X	X	X	X	X	X	-	06-05-2010	(+)
2	Kota Bekasi	ROBINSON SIMANGUNSONG,SH	-	-	-	-	-	-	-		(-)
3	Kabupaten Karawang	TUMPAL H.HUTAPEA,SH	X	X	X	X	X	X	X	05-05-2010	(+)
4	Kabupaten Purwakarta	Drs.ALMAINI,SH	X	X	X	X	X	X	X	05-05-2010	(+)
5	Kabupaten Subang	HENNIE NURAENI ASIKIN,SH,SP1	X	X	X	X	X	X	X	05-05-2010	(+)
6	Kabupaten Bogor	DJAMALUDDIN,SH,M.Hum	X	X	X	X	X	X	X	05-05-2010	(+)
7	Kota Bogor	H.ANDI MUHAMMAD RUM,SH	X	X	X	X	X	-	X	05-05-2010	(+)
8	Kota Depok	Drs.SYAFRIMAN,SH,M.Hum	-	-	-	-	-	-	-		(-)
9	Kabupaten Sukabumi	YUNIAR HIKMAT GINANJAR,SH,MH	X	X	X	X	X	X	X	07-05-2010	(+)
10	Kota Sukabumi	JAMES JF TIRAYOH,SH,Msi	X	X	X	X	X	X	X	03-05-2010	(+)
11	Kabupaten Cianjur	Drs.HERI SANTOSO	X	X	X	X	X	X	X	07-05-2010	(+)
12	Kabupaten Bandung	Ir.H.M.NAJIB TAUFIEQ,MM	X	X	X	X	X	X	X	05-05-2010	(+)
13	Kota Bandung	A..SAMAD SOEMARGA,SH,MH	X	X	X	X	X	X	X	04-05-2010	(+)
14	Kota Cimahi	Drs.H.WAWAN DARMAWAN	X	X	X	-	X	X	X	05-05-2010	(+)
15	Kabupaten Sumedang	Ir.ESTI PRAJOKO,Msi	X	X	X	X	X	X	X	05-05-2010	(+)
16	Kabupaten Garut	YOYOK HADIMULYO ANWAR,SH	X	X	X	X	X	X	-	05-05-2010	(+)
17	Kabupaten Tasikmalaya	Drs.AKUR NURASA,Msi	X	X	X	X	X	X	X	05-05-2010	(+)
18	Kabupaten Ciamis	Ir.T A U F I Q	X	X	X	X	X	X	X	05-05-2010	(+)
19	Kabupaten Cirebon	Ir.M.TONY S.HAROEN M.Sc	X	X	X	X	X	X	X	05-05-2010	(+)
20	Kota Cirebon	Drs.H.DJUANDA SYAHBUDIN	X	X	X	X	X	X	X	06-05-2010	(+)
21	Kabupaten Kuningan	Ir.IRWAN NUZIRWAN	X	X	X	X	X	X	X	05-05-2010	(+)
22	Kabupaten Majalengka	Ir.H.UJANG AMAS	X	X	X	X	X	X	X	05-05-2010	(+)
23	Kabupaten Indramayu	Ir.SUTJAHYO,MM	X	X	-	X	X	X	X	11-05-2010	(±)
24	Kota Tasikmalaya	H.A.BUDIRACHMAN,SH	X	X	X	X	X	X	X	05-05-2010	(+)
25	Kota Banjar	Dr.ASLAN NOOR,SH,SP1	X	X	X	-	-	X	-	11-05-2010	(±)
26	Kabupaten Bandung Barat	DJADJA SUDJANA,SH	-	X	X	X	X	X	X	05-05-2010	(+)

Keterangan
(+) Tepat Waktu
(±) Terlambat
(-) Belum/Tidak mengirimkan
(X) Ada

Bandung, 2010
An.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Barat
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM
NIP.19571129 198003 1 003

f. Rekapitulasi Surat Keputusan yang Diterima dan Uang Pemasukan

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah SK Hak yang Diterima Bulan lalu			Jumlah Uang Yang Harus Disetor ke			Keterangan
		Buah (SK)	Luas (M2)	Jumlah	Kas Negara	YDL	Jumlah (Rp)	
1	Kabupaten Bekasi	0	0	0	0	0	0	
2	Kota Bekasi	0	0	0	0	0	0	
3	Kabupaten Karawang	0	0	0	0	0	0	
4	Kabupaten Purwakarta	0	0	0	0	0	0	
5	Kabupaten Subang	0	0	0	0	0	0	
6	Kabupaten Bogor	0	0	0	0	0	0	
7	Kota Bogor	0	0	0	0	0	0	
8	Kota Depok	0	0	0	0	0	0	
9	Kabupaten Sukabumi	38	321.723	0	0	0	0	
10	Kota Sukabumi	0	0	0	0	0	0	
11	Kabupaten Cianjur	0	0	0	0	0	0	
12	Kabupaten Bandung	23	5.889	0	0	0	0	
13	Kota Bandung	0	0	0	0	0	0	
14	Kota Cimahi	14	1.541	0	0	0	0	
15	Kabupaten Sumedang	0	0	0	0	0	0	
16	Kabupaten Garut	8	6.689	0	0	0	0	
17	Kabupaten Tasikmalaya	4	62.186	0	0	0	0	
18	Kabupaten Ciamis	0	0	0	0	0	0	
19	Kabupaten Cirebon	0	0	0	0	0	0	
20	Kota Cirebon	6	3.354	0	0	0	0	
21	Kabupaten Kuningan	0	0	0	0	0	0	
22	Kabupaten Majalengka	0	0	0	0	0	0	
23	Kabupaten Indramayu	0	0	0	0	0	0	
24	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	
25	Kota Banjar	0	0	0	0	0	0	
26	Kabupaten Bandung Barat	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	93	401.382	0	0	0	0	

Ket :

*) Tidak mengirimkan laporan

Bandung,

Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM

NIP.19571129 198003 1 003

BIDANG PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

BULAN : April 2010

NO	KANTOR PERTANAHAN	Sengketa	Konflik	Perkara			Selesai	Keterangan
				Perdata	PTUN	Pidana		
1	Kabupaten Bekasi	13	0	28	0	0	0	
2	Kota Bekasi	10	0	65	0	0	0	
3	Kabupaten Karawang	2	0	17	1	0	0	
4	Kabupaten Purwakarta	9	1	7	0	0	0	
5	Kabupaten Subang	0	0	17	2	0	0	
6	Kabupaten Bogor	8	0	62	23	0	0	
7	Kota Bogor	3	0	22	1	0	0	
8	Kota Depok	0	0	0	0	0	0	
9	Kabupaten Sukabumi	0	1	13	0	0	0	
10	Kota Sukabumi	0	0	0	0	0	0	
11	Kabupaten Cianjur	20	2	16	0	0	0	
12	Kabupaten Bandung	0	0	24	4	0	0	
13	Kota Bandung	17	0	41	0	0	0	
14	Kota Cimahi	0	0	8	0	0	0	
15	Kabupaten Sumedang	5	0	10	0	0	0	
16	Kabupaten Garut	1	16	8	0	0	0	
17	Kabupaten Tasikmalaya	4	1	1	0	0	0	
18	Kabupaten Ciamis	5	14	9	0	0	0	
19	Kabupaten Cirebon	4	0	22	6	0	0	
20	Kota Cirebon	0	0	0	0	0	0	Nihil
21	Kabupaten Kuningan	4	0	2	0	0	0	
22	Kabupaten Majalengka	2	0	0	0	0	0	
23	Kabupaten Indramayu	0	0	0	0	0	0	
24	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	Nihil
25	Kota Banjar	0	0	0	0	0	0	
26	Kabupaten Bandung Barat	0	0	14	6	0	0	
	Jumlah							

Ket :

*) Tidak mengirimkan laporan

N Nihil=(tidak ada kegiatan)

Bandung,

An.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Barat
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM
NIP.19571129 198003 1 003

BIDANG SURVEI PENGUKURAN DAN PEMETAAN

Bulan :April 2010

No	Kabupaten / Kota	REALISASI PERMOHONAN PENGUKURAN (GS / SU)							
		Sisa Bulan lalu (Buah)	Permohonan Bulan ini (Buah)	Jumlah (Buah)	Selesai		Sisa s/d Bulan ini		Ket
					(Buah)	Luas (M2)	(Buah)	Luas (M2)	
1	Kabupaten Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	*)
2	Kota Bekasi	3.648	1.569	5.217	1.254	-	3.963	-	
3	Kabupaten Karawang	2.141	1.308	3.449	719	-	2.730	-	
4	Kabupaten Purwakarta	153	882	1.035	276	-	759	-	
5	Kabupaten Subang	314	1.935	2.249	92	-	2.157	-	
6	Kabupaten Bogor	1.920	4.391	6.311	4.210	-	2.101	-	
7	Kota Bogor	1.664	1.098	2.762	332	-	2.430	-	
8	Kota Depok	-	-	-	-	-	-	-	*)
9	Kabupaten Sukabumi	665	857	1.522	868	-	654	-	
10	Kota Sukabumi	111	336	447	53	-	394	-	
11	Kabupaten Cianjur	478	256	734	276	-	458	-	
12	Kabupaten Bandung	2.211	1.521	3.732	1.268	-	2.464	-	
13	Kota Bandung	234	1.077	1.311	927	-	384	-	
14	Kota Cimahi	166	359	525	185	-	340	-	
15	Kabupaten Sumedang	190	841	1.031	87	-	944	-	
16	Kabupaten Garut	-	-	-	-	-	-	-	*)
17	Kabupaten Tasikmalaya	350	131	481	102	-	379	-	
18	Kabupaten Ciamis	178	802	980	806	-	174	-	
19	Kabupaten Cirebon	480	864	1.344	435	-	909	-	
20	Kota Cirebon	100	163	263	122	-	141	-	
21	Kabupaten Kuningan	158	152	310	97	-	213	-	
22	Kabupaten Majalengka	388	271	659	194	-	465	-	
23	Kabupaten Indramayu	287	269	556	161	-	395	-	
24	Kota Tasikmalaya	1.361	268	1.629	273	-	1.356	-	
25	Kota Banjar	-	-	-	-	-	-	-	*)
26	Kabupaten Bandung Barat	577	309	886	326	-	560	-	
	Jumlah	17.774	19.659	37.433	13.063	-	24.370	-	

Bandung,

Ket :

Kepala Bagian Tata Usaha

*) Tidak mengirimkan laporan

Drs.H.ARMANSYAH SALAM

NIP.19571129 198003 1 003

1. BAGIAN TATA USAHA

a. Rekapitulasi Jumlah Surat Masuk dan Keluar

Bulan : April 2010

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Surat		Keterangan
		Masuk	Keluar	
1	Kantor Wilayah BPN	434	1623	
2	Kabupaten Bekasi	179	57	
3	Kota Bekasi	567	19	
4	Kabupaten Karawang	375	93	
5	Kabupaten Purwakarta	110	51	
6	Kabupaten Subang	160	188	
7	Kabupaten Bogor	604	345	
8	Kota Bogor	138	38	
9	Kota Depok			*)
10	Kabupaten Sukabumi	178	64	
11	Kota Sukabumi	80	65	
12	Kabupaten Cianjur	161	105	
13	Kabupaten Bandung	207	104	
14	Kota Bandung	239	183	
15	Kota Cimahi	110	53	
16	Kabupaten Sumedang	97	52	
17	Kabupaten Garut	79	33	
18	Kabupaten Tasikmalaya	78	60	
19	Kabupaten Ciamis	72	72	
20	Kabupaten Cirebon	167	91	
21	Kota Cirebon	163	45	
22	Kabupaten Kuningan	83	28	
23	Kabupaten Majalengka	122	74	
24	Kabupaten Indramayu	127	43	
25	Kota Tasikmalaya	78	62	
26	Kota Banjar	69	41	
27	Kabupaten Bandung Barat			*)

Keterangan

*) Tidak mengirim laporan

Bandung,

An.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Jawa Barat

Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM

NIP.19571129 198003 1 003

F. Tanah : Swapraja

No.	Kabupaten / Kota	Sisa Obyek Yang Diredistribusikan		Luas Tanah Yang Sudah Diredistribusi (REDISTRIBUSI)				Luas Tanah Yang Diusulkan Diredistribusikan		Pembayaran Ganti Rugi Dari Negara Kepada Bekas Pemilik			Usul Pembayaran Ganti Rugi Dari Negara			Ket.
		Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Dibagikan Kepada (KK)	Uang Pemasukan Kpd Negara (Rp)	Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Besarnya Ganti Rugi (Rp)	Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Besarnya Ganti Rugi (Rp)	
1	Kabupaten Bekasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
2	Kota Bekasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
3	Kabupaten Karawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
4	Kabupaten Purwakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*)
5	Kabupaten Subang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
6	Kabupaten Bogor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
7	Kota Bogor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
8	Kota Depok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*)
9	Kabupaten Sukabumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
10	Kota Sukabumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
11	Kabupaten Cianjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
12	Kabupaten Bandung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
13	Kota Bandung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
14	Kota Cimahi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*)
15	Kabupaten Sumedang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
16	Kabupaten Garut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
17	Kabupaten Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
18	Kabupaten Ciamis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
19	Kabupaten Cirebon	14.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Kota Cirebon	3.799.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Kabupaten Kuningan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
22	Kabupaten Majalengka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
23	Kabupaten Indramayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
24	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
25	Kota Banjar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*)
26	Kabupaten Bandung Bara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
	Jumlah	3.814.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ket :

*) Tidak mengirimkan laporan

Bandung,

Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM

NIP.19571129 198003 1 003

DAFTAR PENERIMAAN LAPORAN BULANAN
DARI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
SE-JAWA BARAT

NO	KABUPATEN / KOTA	KEPALA KANTOR	JENIS LAPORAN							PENERIMAAN	EVALUASI
			UMUM	UP	PPS&KP	P3	P3M	HT&PT	SP&P		
1	Kabupaten Bekasi	Drs.PURWO SASMITO,Msi	X	X	X	X	X	X	-	04-06-2010	(+)
2	Kota Bekasi	ROBINSON SIMANGUNSONG,SH	X	X	X	X	X	X	X	04-06-2010	(+)
3	Kabupaten Karawang	TUMPAL H.HUTAPEA,SH	X	X	X	X	X	X	X	04-06-2010	(+)
4	Kabupaten Purwakarta	Drs.ALMAINI,SH	X	X	X	X	X	X	X	04-06-2010	(+)
5	Kabupaten Subang	HENNIE NURAENI ASIKIN,SH,SP1	X	X	X	X	X	X	X	03-06-2010	(+)
6	Kabupaten Bogor	DJAMALUDDIN,SH,M.Hum	X	X	-	X	X	X	X	04-06-2010	(+)
7	Kota Bogor	H.ANDI MUHAMMAD RUM,SH	X	X	X	X	X	X	X	04-06-2010	(+)
8	Kota Depok	Drs.SYAFRIMAN,SH,M.Hum	X	X	X	X	-	X	X	08-06-2010	(+)
9	Kabupaten Sukabumi	YUNIAR HIKMAT GINANJAR,SH,MH	X	X	X	X	X	X	X	04-06-2010	(+)
10	Kota Sukabumi	JAMES JF TIRAYOH,SH,Msi	X	X	X	X	X	X	X	01-06-2010	(+)
11	Kabupaten Cianjur	Drs.HERI SANTOSO	X	X	X	X	X	X	X	09-06-2010	(+)
12	Kabupaten Bandung	Ir.H.M.NAJIB TAUFIEQ,MM	X	X	X	X	X	X	X	03-06-2010	(+)
13	Kota Bandung	A..SAMAD SOEMARGA,SH,MH	X	X	X	X	X	X	X	03-06-2010	(+)
14	Kota Cimahi	Drs.H.WAWAN DARMAWAN	X	X	X	X	X	X	X	04-06-2010	(+)
15	Kabupaten Sumedang	Ir.ESTI PRAJOKO,Msi	X	X	X	X	X	X	X	07-06-2010	(+)
16	Kabupaten Garut	YOYOK HADIMULYO ANWAR,SH	X	X	X	X	X	X	X	03-06-2010	(+)
17	Kabupaten Tasikmalaya	Drs.AKUR NURASA,Msi	X	X	X	X	X	X	X	04-06-2010	(+)
18	Kabupaten Ciamis	Ir.T A U F I Q	X	X	X	X	X	X	X	04-06-2010	(+)
19	Kabupaten Cirebon	Ir.M.TONY S.HAROEN M.Sc	X	X	X	X	X	X	X	04-06-2010	(+)
20	Kota Cirebon	Drs.H.DJUANDA SYAHBUDIN	X	X	X	X	X	X	X	07-06-2010	(+)
21	Kabupaten Kuningan	Ir.IRWAN NUZIRWAN	X	X	X	X	X	X	X	08-06-2010	(+)
22	Kabupaten Majalengka	Ir.H.UJANG AMAS	X	X	-	X	X	X	X	03-06-2010	(+)
23	Kabupaten Indramayu	Ir.SUTJAHYO,MM	X	X	X	X	X	X	X	07-06-2010	(+)
24	Kota Tasikmalaya	H.A.BUDIRACHMAN,SH	X	X	X	-	X	X	X	03-06-2010	(+)
25	Kota Banjar	Dr.ASLAN NOOR,SH,SP1	X	X	-	-	-	X	X	08-06-2010	(+)
26	Kabupaten Bandung Barat	DJADJA SUDJANA,SH	X	X	X	X	X	X	X	02-06-2010	(+)

Keterangan
(+) Tepat Waktu
(+) Terlambat
(-) Belum/Tidak mengirimkan
(X) Ada

Bandung, 2010
An.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Barat
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM
NIP.19571129 198003 1 003

d. Rekapitulasi Jumlah Laporan Pejabat Pembuatan Akta Tanah

No.	Kabupaten / Kota	JENIS AKTA										
		Jual Beli (Buah)	Hibah (Buah)	Waris/ PDP (Buah)	APHB (Buah)	Pemisahan & Pembagian (Buah)	Tukar Menukar (Buah)	Pelepasan Hak (Buah)	Pemasukan ke dlm persh. (Buah)	APHT (Buah)	SKMHT (Buah)	Jumlah (Buah)
1	Kabupaten Bekasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Kota Bekasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Kabupaten Karawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Kabupaten Purwakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kabupaten Subang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kabupaten Bogor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Kota Bogor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Kota Depok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kabupaten Sukabumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kota Sukabumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kabupaten Cianjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kabupaten Bandung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Kota Bandung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Kota Cimahi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Kabupaten Sumedang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Kabupaten Garut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Kabupaten Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Kabupaten Ciamis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kabupaten Cirebon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Kota Cirebon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Kabupaten Kuningan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Kabupaten Majalengka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Kabupaten Indramayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Kota Banjar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Kabupaten Bandung Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah											

Ket :

*) Tidak mengirimkan laporan

BIDANG PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

BULAN : Mei 2010

NO	KANTOR PERTANAHAN	Sengketa	Konflik	Perkara			Selesai	Keterangan
				Perdata	PTUN	Pidana		
1	Kabupaten Bekasi	14	0	29		0	0	
2	Kota Bekasi	10	0	59	0	0	0	
3	Kabupaten Karawang	0	0	17	1	0	0	
4	Kabupaten Purwakarta	9	1	7	0	0	0	
5	Kabupaten Subang	1	0	17	0	0	0	
6	Kabupaten Bogor	0	0	0	0	0	0	*)
7	Kota Bogor	2	3	22	1	0	0	
8	Kota Depok	18	3	101	0	0	0	
9	Kabupaten Sukabumi	15	1	34	0	0	0	
10	Kota Sukabumi	0	0	13	0	0	0	
11	Kabupaten Cianjur	20	2	16	0	0	0	
12	Kabupaten Bandung	5	2	26	4	3	0	
13	Kota Bandung	15	0	43	0	0	0	
14	Kota Cimahi	0	0	10	0	0	0	
15	Kabupaten Sumedang	5	0	10	0	0	0	
16	Kabupaten Garut	1	15	8	0	0	0	
17	Kabupaten Tasikmalaya	4	1	1	0	0	0	
18	Kabupaten Ciamis	5	14	9	0	0	0	
19	Kabupaten Cirebon	4	0	22	6	0	0	
20	Kota Cirebon	0	0	0	0	0	0	
21	Kabupaten Kuningan	5	0	2	0	0	0	
22	Kabupaten Majalengka	0	0	0	0	0	0	*)
23	Kabupaten Indramayu	0	0	0	0	0	0	*)
24	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	NIHIL
25	Kota Banjar	0	0	0	0	0	0	*)
26	Kabupaten Bandung Barat	4	0	14	6	0	0	
	Jumlah							

Ket :

*) Tidak mengirimkan laporan

N Nihil=(tidak ada kegiatan)

Bandung,

An.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Barat
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM
NIP.19571129 198003 1 003

BIDANG SURVEI PENGUKURAN DAN PEMETAAN

Bulan :Mei 2010

No	Kabupaten / Kota	REALISASI PERMOHONAN PENGUKURAN (GS / SU)							Ket
		Sisa Bulan lalu (Buah)	Permohonan Bulan ini (Buah)	Jumlah (Buah)	Selesai (Buah)	Selesai Luas (M2)	Sisa s/d Bulan ini (Buah)	Sisa s/d Bulan ini Luas (M2)	
1	Kabupaten Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kota Bekasi	3.953	658	4.611	2.713	-	1.898	-	
3	Kabupaten Karawang	2.730	495	3.225	697	-	2.528	-	
4	Kabupaten Purwakarta	759	429	1.188	635	-	553	-	
5	Kabupaten Subang	2.157	284	2.441	73	-	2.368	-	
6	Kabupaten Bogor	2.101	2.522	4.623	3.254	-	1.369	-	
7	Kota Bogor	2.430	453	2.883	319	-	2.564	-	
8	Kota Depok	-	1.199	1.199	1.244	-	-	-	
9	Kabupaten Sukabumi	684	512	1.196	426	-	770	-	
10	Kota Sukabumi	288	57	345	24	-	321	-	
11	Kabupaten Cianjur	458	272	730	243	-	487	-	
12	Kabupaten Bandung	2.572	1.215	3.787	983	-	2.804	-	
13	Kota Bandung	384	995	1.379	905	-	474	-	
14	Kota Cimahi	340	134	474	216	-	258	-	
15	Kabupaten Sumedang	944	426	1.370	93	-	1.277	-	
16	Kabupaten Garut	616	421	1.037	507	-	530	-	
17	Kabupaten Tasikmalaya	438	78	516	214	-	302	-	
18	Kabupaten Ciamis	174	1.667	1.841	537	-	1.304	-	
19	Kabupaten Cirebon	909	393	1.302	542	-	760	-	
20	Kota Cirebon	141	342	483	316	-	167	-	
21	Kabupaten Kuningan	213	370	583	307	-	276	-	
22	Kabupaten Majalengka	669	269	938	89	-	849	-	
23	Kabupaten Indramayu	395	586	981	452	-	529	-	
24	Kota Tasikmalaya	1.356	229	1.585	284	-	1.301	-	
25	Kota Banjar	-	-	-	-	-	-	-	
26	Kabupaten Bandung Barat	560	375	935	456	-	479	-	
	Jumlah	25.271	14.381	39.652	15.529	-	24.168	-	

Bandung,

Kepala Bagian Tata Usaha

Ket :

*) Tidak mengirimkan laporan

Drs.H.ARMANSYAH SALAM

NIP.19571129 198003 1 003

BAGIAN TATA USAHA

a. Rekapitulasi Jumlah Surat Masuk dan Keluar

Bulan : Mei 2010

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Surat		Keterangan
		Masuk	Keluar	
1	Kantor Wilayah BPN	331	1170	
2	Kabupaten Bekasi	183	44	
3	Kota Bekasi	527	23	
4	Kabupaten Karawang	333	85	
5	Kabupaten Purwakarta	101	27	
6	Kabupaten Subang	160	61	
7	Kabupaten Bogor	573	343	
8	Kota Bogor	123	42	
9	Kota Depok	398	110	
10	Kabupaten Sukabumi	175	69	
11	Kota Sukabumi	84	50	
12	Kabupaten Cianjur	161	105	
13	Kabupaten Bandung	190	93	
14	Kota Bandung	273	118	
15	Kota Cimahi	102	72	
16	Kabupaten Sumedang	122	52	
17	Kabupaten Garut	56	27	
18	Kabupaten Tasikmalaya	68	56	
19	Kabupaten Ciamis	73	36	
20	Kabupaten Cirebon	155	59	
21	Kota Cirebon	139	63	
22	Kabupaten Kuningan	69	33	
23	Kabupaten Majalengka	111	90	
24	Kabupaten Indramayu	102	46	
25	Kota Tasikmalaya	114	32	
26	Kota Banjar	69	32	
27	Kabupaten Bandung Barat	88	99	

Keterangan

*) Tidak mengirim laporan

Bandung,

An.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Jawa Barat

Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM

NIP.19571129 198003 1 003

F. Tanah : Swapraja

No.	Kabupaten / Kota	Sisa Obyek Yang Diredistribusikan		Luas Tanah Yang Sudah Diredistribusi (REDISTRIBUSI)				Luas Tanah Yang Diusulkan Diredistribusikan		Pembayaran Ganti Rugi Dari Negara Kepada Bekas Pemilik			Usul Pembayaran Ganti Rugi Dari Negara			Ket.
		Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Dibagikan Kepada (KK)	Uang Pemasukan Kpd Negara (Rp)	Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Besarnya Ganti Rugi (Rp)	Luas Tanah (M2)	Jumlah Bekas Pemilik (KK)	Besarnya Ganti Rugi (Rp)	
1	Kabupaten Bekasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
2	Kota Bekasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*)
3	Kabupaten Karawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
4	Kabupaten Purwakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*)
5	Kabupaten Subang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
6	Kabupaten Bogor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
7	Kota Bogor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
8	Kota Depok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*)
9	Kabupaten Sukabumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
10	Kota Sukabumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
11	Kabupaten Cianjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
12	Kabupaten Bandung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
13	Kota Bandung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
14	Kota Cimahi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
15	Kabupaten Sumedang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
16	Kabupaten Garut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
17	Kabupaten Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
18	Kabupaten Ciamis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
19	Kabupaten Cirebon	14.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Kota Cirebon	3.799.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Kabupaten Kuningan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
22	Kabupaten Majalengka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
23	Kabupaten Indramayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
24	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*)
25	Kota Banjar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*)
26	Kabupaten Bandung Bara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
	Jumlah	3.814.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ket :

*) Tidak mengirimkan laporan

Bandung,

Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H.ARMANSYAH SALAM

NIP.19571129 198003 1 003

2.2.2 Deskripsi Kegiatan Insidentil Selama PKL

Pada saat melaksanakan PKL di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi (BPN) Provinsi Jawa Barat, penulis pernah menjalankan beberapa kegiatan insidentil, yaitu diantaranya:

2.2.2.1 Mencari Arsip Surat di Ruangan Arsip

Setiap kali surat permohonan atau peninjauan masuk, pihak BPN selalu mengumpulkan, mendata, dan mengarsipkan surat-surat tersebut supaya kemudian nantinya mudah dicari bila suatu saat ada orang yang meminta untuk melakukan permohonan atau peninjauan ulang. Kesemua surat tersebut kemudian disimpan di sebuah gedung khusus yang berada di belakang gedung Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat.

Gedung arsip ini sendiri mulai digunakan sejak pertengahan 1990-an, dan disana masih tersimpan rapi arsip-arsip dari era tahun 1970-an sampai saat ini. Bahkan masih tersimpan juga arsip dari daerah Banten, yang kini sudah terpisah dengan Jawa Barat dan menjadi provinsi sendiri.

Penulis sendiri (dengan diawasi oleh pembimbing PKL demi keamanan dan kerahasiaan data yang ada di gedung arsip) sempat dimina untuk membantu mencarikan arsip-arsip dari tahun-tahun lawas. Isi arsip-arsip dalam gedung arsip ini pun

terbilang sangat rapi, karena dikelompokan menurut jenis surat dan data yang ada. Misalnya untuk data HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) yang diletakan dalam satu rak khusus, dan begitu pula dengan data-data lainnya.Gedung arsip ini memiliki dua lantai, dimana di lantai atas sering dipakai pula sebagai tempat rapat.

Gambar 2.1
Kondisi Bagian Dalam Gedung Arsip Kanwil BPN Jabar



Sumber: Arsip pribadi penulis

2.2.2.2 Menjilid Dokumen Untuk Dijadikan Arsip

Setiap bulan memasuki bulan baru, pihak BPN Kanwil Jabar selalu melakukan rekapitulasi terhadap data-data yang masuk di bulan sebelumnya. Data-data ini kemudian dikelompokan menurut kode seperti yang tertera di tabel 2.2 diatas, untuk kemudian di jilid. Penulis sendiri sempat mendapatkan kesempatan untuk membantu mendata sekaligus mengantar data-data dari awal bulan Januari 2010 sampai bulan Mei 2010 yang kemudian penulis bantu antarkan untuk dijilid *hard cover* ke tempat penjilidan.

2.3 Deskripsi Tentang Humas

2.3.1. Definisi Humas

Secara definitif Humas adalah suatu fungsi manajemen yang bertujuan menjembatani antara institusi dengan *stakeholder* baik luar maupun dalam. Apa pun yang terjadi di organisasi, humas harus tahu. Humas harus mengetahui segala kebijakan yang lalu, sedang dan akan diberlakukan organisasi. Seperti humas di perusahaan swasta, seperti itulah idealnya Bagian Humas pemerintah pusat ataupun daerah.

Jadi, humas sebagai juru bicara pemerintah harus mengetahui segala kebijakan pimpinan, latar belakang kebijakan yang diambil dan tujuan yang diharapkan.Setiap kebijakan publik yang diambil itu dapat diimplementasikan dengan baik, sangat membutuhkan dukungan publik.

Tapi bagaimana publik mau mendukung, kalau tidak mengetahui maksud kebijakan tersebut.

Di samping itu, sering ditemui masalah yaitu kebijakan publik yang diambil pejabat ditanggapi salah oleh masyarakat. Ini terjadi, karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait dengan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut.Untuk itu sangat diperlukan `penyampai pesan' yang baik, dan humas harus mampu melaksanakannya.

Fungsi humas dalam BPN Kanwil Jawa Barat sendiri kurang optimal dan dikarenakan memang tidak adanya divisi humas di kantor ini. Yang disebut humas disini disebut sebagai Sub Bagian Umum dan Informasi. Meskipun berbeda dengan tugas dan fungsi humas sebagai mestinya, bagian umum ini bisa dikatakan humas, karena memang tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat. Kegiatan utama yang sangat erat relevansinya dengan kegiatan kehumasan di Sub Bagian Umum dan Informasi ini adalah menjalin hubungan antar bagian dalam struktural organisasi BPN itu sendiri (fungsi kedalam) dan juga melayani dan membantu masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai pertanahan baik yang ingin melakukan peninjauan atau permintaan bantuan tentang suatu permasalahan pertanahan kepada BPN (fungsi keluar).

2.3.2. Fungsi Humas

1. Memberikan penerangan kepada publik.
2. Melakukan persuasi kepada publik untuk mengubah sikap dan tingkah laku publik.
3. Upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat, atau sebaliknya.

2.3.3. Kegiatan Humas

Tujuh puluh persen dari kegiatan seorang humas berhubungan dengan tulis menulis selain tugas-tugas lainnya. Diantaranya adalah:

1. Merancang pesan tematik agar pesan yang disampaikan oleh organisasi memiliki keseragaman/ keterkaitan pesan.
2. Melakukan segmentasi media, dimana seorang humas harus mampu memformulasikan keseimbangan saling dukung antara media cetak dan elektronik.
3. Komunikasi interaktif. Contohnya beberapa organisasi dalam merancang logonya melakukan pelibatan konsumen dimana dilakukan kompetisi merancang logo, contoh lain adalah rubrik konsultasi atau jasa layanan konsumen melalui telepon.
4. Menjaga reputasi perusahaan dan citra produk melalui pemanfaatan kekuatan pesan dan atau kombinasinya.
5. Iklan multiguna (memanfaatkan momentum psikologis).

6. Penjualan simpatik.
7. Melakukan iklan layanan masyarakat.
8. Pemasaran dari mulut kemulut. Contoh: Taksi *Bluebird* dalam memasarkan reputasi yang baik jarang menggunakan iklan media massa.
9. Ajang pemasaran khusus dimana aktivitas dirancang untuk melibatkan khalayak.
10. Memanfaatkan komunikasi yang akrab untuk pelanggan.

2.3.4. Humas Sebagai Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat (*Community Development*) secara umum merupakan kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan.

Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Program Community Development memiliki tiga karakter utama yaitu: berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Dua sasaran yang ingin dicapai yaitu: sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Sasaran pertama yaitu kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses

produksi, kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kerjasama (*cooperation*), kesemuanya berjalan secara serentak[1].

2.4 Analisis selama PKL

Pekerjaan yang dilakukan di suatu departemen pemerintahan dikenal dengan adanya golongan atau pangkat apabila yang mempunyai golongan lebih rendah harus menghargai golongan yang lebih tinggi clan slap untuk melaksanakan tugas atau perintah golongan diatasnya, dan melakukan komunikasi yang baik dengan sesama pekerja balk itu dengan atasan ataupun bawahan seperti pengertian komunikasi berikut ini:

Komunikasi mutlak memegang peranan yang penting dalam suatu organisasi. Tanpa komunikasi yang harmonis dan efektif, perusahaan tidak akan dapat mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.Itulah sebabnya Chester I Bernard menaruh komunikasi sebagai unsur yang pertama dari segenap organisasi. (Lian Gie, 1968 : 86).

Biasanya perintah atasan selalu dilaksanakan oleh bawahan dengan cepat dan efektif. Di Sub Bagian Umum dan Informasi kantor BPN KANWIL Jawa Barat sendiri, atasan memberikan intruksi kepada bawahannya untuk menyelasaikan suatu pekerjaan, atau suatu tugas. Setelah mendapatkan instruksi dari atasan, semua karyawan di bagian ini langsung saling bekerja sama (biasanya bekerjasama dengan bagian lain

[1]http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_masyarakat

yang ada hubungannya dengan perintah yang dikeluarkan dari atasan) untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai tenggat waktu dari atasan. Setelah itu hasilnya kemudian diserahkan kembali kepada atasan untuk dilihat dan ditinjau ulang, dan jika memang telah sesuai prosedur dan dapat diterima oleh semua bagian yang termasuk dalam pekerjaan tersebut, termasuk oleh atasan, maka hasilnya akan diumumkan kepada masyarakat, biasanya lewat media massa (surat kabar). Hal yang telah dijelaskan diatas mencerminkan salah satu wujud definisi humas seperti yang dituturkan oleh Frank Jefkins (1995:9) yaitu *public relations* adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana dalam sebuah organisasi.

Demikian juga dengan permintaan permohonan pelayanan dari masyarakat. Ketika ada permohonan yang masuk dari masyarakat pihak Sub Bagian Umum dan Informasi kemudian langsung membuat surat pengantar atau permintaan bantuan kepada salah satu bagian lain dalam kantor BPN yang dituju (seperti bagian HTPT, PPSKP, SPP, dan sebagainya) untuk kemudian proses peninjauan di mulai. Alurnya nyaris sama seperti ketika ada instruksi yang turun dari atasan, yaitu semua bagian harus dapat menyelesaikan atau mencari solusi atas peninjauan permasalahan tersebut dalam tenggat waktu yang sudah disepakati bersama antara pihak pemohon (masyarakat) dengan pihak BPN), dengan harapan kedua belah pihak bisa mendapatkan kesepakatan dan tujuan yang

sama serta saling pengertian yang baik dari permasalahan tersebut (Frank Jefkins, 1995:9)

Banyaknya prosedur dan peraturan diharuskan mempunyai pengalaman yang luas dalam melakukan pekerjaan oleh sebab itu disiplin, loyalitas serta kemampauan dan ketelitian dalam menyelesaikan tugas harus mutlak dimiliki oleh setiap karyawan BPN pada umumnya dan khususnya karyawan SubBagian Umum dan Informasi, agar pekerjaan yang dilakukan mempunyai hasil yang maksimal sebab apabila adanya kesalahan sedikit dalam pekerjaan di instansi seperti pemerintahan akan menyebabkan kesalahan yang sangat fatal karena data ini merupakan data utama dalam setiap data kepemilikan tanah.

2.5 Analisis Pelayanan Lembaga Terhadap Mahasiswa Selama PKL

Pelayanan terhadap para mahasiswa yang melaksanakan PKL di BPN KANWIL Jawa Barat SubBagian Umum dan Informasi sangatlah balk, penulis merasa bahwa perlakuan terhadap mahasiswa yang PKL tidak dibeda-bedakan, para mahasiswa diberlakukan layaknya seorang karyawan, bukan sebagai pesuruh yang harus menuruti para karyawan.

Para karyawan di SubBagian Umum dan Informasi dengan senang hati membantu para mahasiswa dalam melengkapi kebutuhan untuk penulisan laporan dengan sikap kekeluargaan, dan saling membantu satu sama lain.

Tapi yang menjadi kendala adalah, terbatasnya akses terhadap data-data yang ada di arsip-arsip, dikarenakan hampir semua data-data dalam SubBagian Umum dan Informasi merupakan data rahasia yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar. Kalaupun diperbolehkan untuk mengakses, penulis harus didampingi pihak dari BPN untuk memastikan keamananan dan kerahasiaan data yang akan diambil oleh penulis.